ALAT BUKTI SUMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Khairatin Azizah, Muammar bin Mosni, Kholili Anam, Mega Ayu Ningtyas
UIN sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya
khairatinazizah99@gmail.com, ammarmosni@gmail.com,
kholilianam06@gmail.com, megahayu700@gmail.com

Abstract: *This article discusses proof through oath from the perspective of Islamic law. This article was written based on the results of a qualitative literature review and the data collected were analyzed inductively. An oath is a statement made by someone who carries the name of God. An oath made in the name of God may not be used as a toy or placed on something that is not reasonable, even if it is not intentional, because an oath has consequences for the person who carries out the oath. An oath according to Islamic law is an utterance accompanied by the mention of the name of Allah, intending to convince the other party about the veracity of the utterance of the oath. If what is to be convinced is contrary to the heart of the speaker, then he is willing to receive sanctions from Allah. In Islamic law, an oath made by someone who is litigating in court can be used as evidence.*

Keywords: *Oath, court, Islamic law.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembuktian melalui sumpah dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka yang bersifat kualitatif dan data yang terkumpul dianalisis secara induktif. Sumpah merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan membawa nama Tuhan. Sumpah yang dilakukan atas nama Tuhan tidak boleh dijadikan mainan atau ditempatkan pada hal yang tidak wajar, meskipun dengan tidak sengaja, karena sumpah memiliki konsekuensi kepada orang yang melaksanakan sumpah tersebut. Sumpah menurut hukum Islam merupakan suatu ucapan yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Apabila apa yang hendak diyakinkan itu bertentangan dengan isi hati pengucap, maka ia bersedia mendapatkan sanksi dari Allah. Dalam hukum Islam, sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang berperkara di pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Kata Kunci: Sumpah, pengadilan, hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk yang bersifat sosial, memiliki banyak aktivitas yang tak terbatas waktu dan tempat. Sehingga manusia tidak jauh dari interaksi yang saling membutuhkan satu

dengan yang lain.¹ Namun hubungan sosial tersebut banyak memiliki keberagaman yang dapat memunculkan persatuan ataupun perpecahan. Dalam hal perpecahan atau perselisihan ada beberapa upaya untuk menyelesaikannya. Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuknya sebuah lembaga peradilan sebagai wadah masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan atau yang berperkara.²

Indonesia memiliki berbagai bentuk lembaga peradilan di antaranya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Setiap peradilan memiliki hukum acara sesuai dengan kasus yang ditangani.

Ketika terdapat dua pihak bersengketa di pengadilan, maka dalam proses setiap peradilannya kedua pihak diharuskan menyediakan bukti, dari penggugat maupun tergugat sehingga dapat menguatkan masing-masing dari mereka yang memiliki perkara dan menunjukkan sebagai macam alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan hukum, di antara bukti yang tercantum ialah sumpah.

Secara umum sumpah adalah pernyataan khusus yang diberikan atau diucapkan pada saat memberikan janji atau pernyataan dengan mengingat sifat kuasa Tuhan. Intinya, sumpah yang bersifat religius digunakan dalam peradilan.³ Daam syariat Islam sumpah tidak hanya digunakan sebagai alat bukti ketika sedang berperkara saja, melainkan selalu digunakan dalam kegiatan

¹ Nur Ahmad, "Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah," *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2014): 17–34, journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/506/494%0A oleh N Ahmad - Artikel terkait.

² Wahyudi Ariandi, Usanti, "Peran Lembaga Peradilan Dalam Hukum Perdata," *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 1–16.

³ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 487.

dan aktifitas yang lain seperti hal jual beli dan semacam transaksi yang lain.⁴

Dalam Islam, sumpah disyariatkan dengan menyebut nama Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah/2 : 224 yaitu:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Arti ayat di atas adalah melarang seluruh umat Islam bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat baik, seperti “Demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim”. Tetapi jika sumpah seperti itu telah diucapkan, maka sumpah tersebut harus dilanggar dan pelakunya mengganti sumpahnya dengan membayar kifar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan dianalisis secara logis dan sistematis tentang pengenaan sumpah sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam/68:10 yaitu:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina “

Dalam istilah bahasa Arab pembuktian berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya menjelaskan. Artinya pembuktian berarti keterangan atau segala sesuatu yang menjelaskan segala kebenaran.⁵ Hal ini jika dikorelasikan dengan Pengadilan Agama maka *al-bayyinah* berarti alat-alat bukti yang digunakan dalam sidang di pengadilan agama.

⁴ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 487.

⁵ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.

Di dalam pengadilan pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, karena dalam menerapkan suatu keadilan adalah menggunakan pembuktian. Menurut R. Subekti pembuktian adalah proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶

Dalam ketentuan pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg serta Pasal 1885 KUH Perdata macam-macam alat bukti perkara perdata antara lain sebagai berikut: alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Berdasarkan urutan tersebut sumpah merupakan alat bukti terakhir dalam perkara perdata.

Adapun macam-macam pembuktian dalam hukum islam terdapat beberapa pendapat, menurut Ulama Hanafiyah pembuktian dikelompokkan menjadi:⁷ Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, *qasamah*, *bayyinah*, *ilmu qadli*, dan *qarinah*. Sedangkan menurut para fuqaha macam-macam alat bukti antara lain: Sumpah, *syahadah* (saksi), *yamin*, *nukul*, *qasamah*, ilmu pengetahuan hakim, dan *qarinah*.

Dalam memberikan keputusan bagi pihak yang bersengketa, hendaknya hakim mendengarkan atau melihat keterangan dari kedua belah pihak. Keterangan tersebut dapat berupa pernyataan dari saksi atau juga bisa berupa alat bukti dari para pihak. Adapun alat bukti tersebut dalam hukum Islam dapat berupa pengakuan, sumpah, penolakan sumpah, *qasamah*, *bayyinah* dan *qarinah*.

Dalam proses perkara peradilan, pembuktian merupakan tahapan yang tidak boleh terlewatkan karena dalam konteks proses perkara perdata atau perkara pidana secara keseluruhan merupakan bagian atau tahapan dari proses tersebut, oleh karena itu tujuan dan prinsip yang berlaku juga untuk bukti. Akan tetapi kalau tujuan dari suatu proses peradilan, pengadilan ialah agar supaya yang berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa dan yang dapat dipaksakan faktanya

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Paradyna Paramita, 2005), 1.

jika dipandang hal itu perlu, maka pembuktianpun mengikuti tujuannya.

Fakta atau peristiwa-peristiwa dalam dalil para pihak, terutama yang menyangkut perselisihan, perlu diverifikasi oleh para pihak yang berselisih. Mengenai fakta atau peristiwa tersebut, hakim pada umumnya dianggap tidak mengetahui apa yang diberitakan oleh para pihak dan hal-hal yang dikemukakan di pengadilan mengenai peristiwa tersebut harus dikukuhkan dengan alat bukti dan salah satunya adalah alat bukti sumpah. Dalam pembuktian, sumpah merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang telah tercatat dalam undang-undang acara hukum.⁸

Berdasarkan hal tersebut penulis membahas tentang sumpah sebagai alat bukti dalam artikel ini.

Pengertian Sumpah

Secara bahasa, definisi sumpah berasal dari kata bahasa Arab "al-yamin" maknanya "tangan kanan", "kekuatan", dan "sumpah". Kata tersebut merupakan kata yang *musytarak* di antara ketiga makna tersebut. Namun yang digunakan sebagai arti kata *al-yamin* adalah arti "Sumpah", karena pada masa jahiliyah orang ketika bersumpah dengan memegang tangan temannya, atau karena orang yang bersumpah bertujuan untuk menguatkan diri dengan niatnya seperti tangan kanannya karena tangan kanannya lebih kuat dari tangan kiri.

Sumpah adalah perbuatan yang sangat religius yang digunakan di pengadilan. Ia adalah pernyataan khusus yang diberikan atau diucapkan pada saat janji dengan atas nama tuhan. Maka dari itu, diyakini bahwa siapapun yang memberikan keterangan atau janji palsu akan dihukum oleh tuhan.⁹

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 270.

⁹ Wahyudin, "Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia," n.d., <https://docplayer.info/73478450-Kekuatan-hukum-sumpah-sebagai-alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia.html>. (diakses pada 4 Februari 2021, pukul 12.18).

M. H. Tirtaamidjaja, mengartikan sumpah dengan pernyataan yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, jika seseorang yang mengucapkan sumpah itu dan memberikan pernyataan yang tidak benar, ia akan rela dikutuk oleh Tuhan. Jadi sumpah menurut istilah adalah pernyataan yang menyebutkan nama tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing pelaku dan pemberi sumpah. Secara umum, sumpah memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam pembukuan hukum acara di Indonesia, baik perdata maupun pidana.

Sumpah adalah suatu ucapan atau keterangan dengan berdasarkan menyebut nama Tuhan sesuai dengan keyakinan seseorang yang mengerjakan sumpah tersebut. Adapun pembuktian sumpah di pengadilan Indonesia diatur dalam HIR, RBG dan KUH Perdata.

a. Dalam HIR

Dalam HIR itu ditetapkan secara terpisah ke dua bagian berbeda: 1) Pasal 155.156.157 dan 158 diatur dalam BAB IX bagian pertama tentang pemeriksaan perkara yang diadili. 2) Pasal 177 diatur dalam BAB IX bagian kedua tentang pembuktian. Kedua bagian tersebut digabungkan dengan ketentuan bukti sumpah dalam HIR yang terdiri dari 5 (lima) pasal. Pengaturan dalam RBG sama dengan sistem dalam HIR, terdapat dua tempat tersendiri yaitu: a) tata cara pemeriksaan diatur dalam Judul IV Bagian I, sidang persidangan terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu pasal 182-185. b) nilai kekuatan alat bukti diatur dalam judul V, Bukti dalam perkara perdata, pasal 314.

b. Dalam KUH Perdata

Diatur dalam buku keempat secara terpisah terkandung dalam: 1) Bab VI yang berjudul tentang sumpah di hadapan hakim. 2) Terdiri dari pasal 1929-1945 sebanyak 17 (tujuh belas) artikel. Terlihat dari uraian diatas, betapa minimnya ketentuan yang terdapat dalam HIR dan RBG jika dibandingkan dengan KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk memperoleh pedoman yang lebih luas dan komprehensif, uraian yang tertuang dalam

makalah ini mengacu pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata. Pembahasan tersebut sendiri sekaligus mencakup hal-hal yang dituangkan dalam HIR dan RBG7.

Jenis Sumpah

Terdapat beberapa jenis sumpah di pengadilan, yaitu sumpah tambahan/pelengkap, sumpah pemutus, sumpah penilaian, dan sumpah li'an:¹⁰

- 1) Sumpah tambahan adalah sumpah perintah dari hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi kurangnya bukti atau untuk meyakinkan hakim. Sumpah pelengkap ini diucapkan oleh salah satu pihak atas instruksi hakim untuk melengkapi alat bukti yang masih dianggap kurang yakinnya terhadap Hakim. Menurut pasal 1943 KUH perdata sumpah tambahan dapat dibebankan dalam hal salah satu pihak telah mempunyai bukti permulaan, namun bukti tersebut belum mencukupi serta tidak ada alat bukti lainnya.
- 2) Sumpah pemutus adalah sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak lain karena tidak ada bukti lain. Sumpah ini merupakan kata yang diucapkan oleh salah satu pihak dari permintaan pihak lain sebagai pembuktian, dikarenakan tidak adanya alat bukti lain, selain kata sumpah tersebut. Apabila tidak terdapat suatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban gugatan tersebut, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lain melakukan sumpah dihadapan hakim.
Sumpah pemutus juga disebut sumpah *decisioir*, ada pula yang menggunakan istilah sumpah penentuan, yakni sumpah dari pihak satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan putusan perkara atas ucapannya ataupunangkatan sumpah. Disebut sebagai sumpah pemutus yakni:
 - a. Merupakan sumpah yang diucapkan salah satu pihak atas perintah atau permintaan pihak lawan.

¹⁰ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 188.

- b. Pihak yang memerintah atau yang meminta sumpah disebut *deferent*, yaitu orang atau pihak yang memerintahkan sumpah pemutus. Sedangkan pihak yang diperintah dinamakan *dalaat* atau *gedefereerde*.
- 3) Sumpah penaksiran, sumpah ini diperintahkan oleh hakim untuk menetapkan harga barang atau kerugian yang dituntut lantaran hakim tersebut terbentur tidak ada jalan lain untuk penaksir kerugian atau harga barang tersebut.¹¹ Sumpah penaksiran merupakan sumpah yang atas permintaan hakim untuk menetapkan harga barang atau kerugian yang dituntut, karena tidak ada jalan lain untuk menaksirkan kerugian dari harga tersebut. Oleh sebab itu sumpah penaksir ini hanya berlaku dalam perkara gugatan ganti rugi saja. Tujuan dari sumpah ini untuk menentukan beberapa kompensasi atau harga yang akan diberikan. Manfaat dari sumpah merupakan alat bukti yang diperkuat dan diperlengkapi untuk meyakinkan hakim akan suatu kebenaran.
- 4) Sumpah li'an adalah sumpah yang merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahwa suami telah berzina terhadap istrinya. Alat bukti sumpah adalah alat bukti berupa pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang atas nama Tuhannya. Dalam hal ini sumpah dianggap sebagai informasi yang selalu benar, karena dilakukan atas nama Tuhan dan dengan demikian seseorang akan merasa takut agar tidak main-main dengan perkataan yang diucapkan.¹² Sumpah li'an adalah sumpah yang dilakukan sebagai pembuktian dari suami bahwa istrinya telah melakukan zina. Sumpah ini hanya terdapat di dalam peradilan agama saja, karena sumpah ini dasarnya terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 265.

¹² Aqsha Surgana and Hernowo Bayu Wicaksono, "Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama," *Gema*, 2015.

Sumpah Menjadi Alat Bukti di Pengadilan

Dalam lingkup peradilan perkara perdata, sumpah lebih dikenal sebagai bukti diantara alat-alat bukti diantara alat bukti yang berlaku dalam ruang lingkup peradilan.¹³ Alat bukti terdiri dari:

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Sumpah adalah alat bukti terakhir yang digunakan para pihak dalam suatu perkara di pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, atau atas perintah salah satu pihak.¹⁴

Bermula dari situ, sehingga penulis akan menganalisis melihat pengaruh alat bukti sumpah ketika diberlakukannya di pengadilan dalam persidangan perkara. Jika melihat arti dan manfaat sumpah, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka adanya sumpah sebagai alat bukti di persidangan, sumpah sebagai alat bukti alternatif terakhir setelah para pihak tidak lagi dapat memberikan bukti lain yang dapat menguatkan tujuan atau pembelaan saat memiliki gugatan. Sehingga ketika Majelis Hakim akan memerintahkan kedua belah pihak untuk bersumpah atau para pihak sendiri yang memohon untuk bersumpah, secara tidak langsung keberadaan alat bukti sumpah ini dapat memberikan pengaruh pada jiwa dan mental yang akan mengucapkan atau melafalkan sumpah. Karena sumpah tersebut berhubungan langsung dengan sang Khalik (Allah), dengan bersumpah para pihak bersedia untuk melafalkan sumpah maka segala resiko dan akibat yang timbul akan berakibat langsung pada yang melafalkannya.

Dengan melihat dan mengamati kedua definisi tersebut, dapat digunakan sebagai dasar sumpah sebagai alat bukti yang berbeda dengan sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan

¹³ Manan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 263.

¹⁴ A. Rasyid, SH. M.A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (cet.2-12; Jakarta: Raja Grafindo Persada.2006),h. 188

keterangan di depan sidang Majelis Hakim. Sumpah saksi adalah mengatakan benar apa yang diketahui, didengar dan apa yang dilihat menurut penjelasannya, bukan sebagai alat bukti tetapi keterangannya menjadi alat bukti, sedangkan sumpah sebagai alat adalah isinya mengenai kebenaran apa para pihak yang bersumpah demi itu. Sumpah juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volleding*), mengikat (*Binden*) dan menentukan (*Beslissen*). Oleh karena itu benar atau salah bahwa pihak yang disumpah oleh hakim tidak boleh menilainya sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan atas keputusan pidana. Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata adalah janji yang diucapkan oleh pihak yang mengambil sumpah dan diucapkan secara lisan di depan sidang Majelis Hakim.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa sumpah sebagai alat bukti adalah pernyataan atau pernyataan yang ditegaskan atas nama Tuhan, yang bertujuan:

- a. Orang yang bersumpah dalam memberikan pernyataan itu, takut akan murka Tuhan, jika dia berbohong.
- b. Rasa takut akan murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai ketakutan pendorong bagi mereka yang ingin bersumpah untuk menjelaskan kebenaran.¹⁵

Shingga, dari segi teori maupun praktik tidak seorangpun yang dapat menjamin tentang kebohongan atau kebenaran sumpah sebagai alat bukti.

Secara materil,¹⁶ siapapun tidak dapat menjamin apa yang diikrarkan atau dilafalkan dalam sumpah ketika sidang pengadilan, hal ini sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang pasti. Akan tetapi pada undang-undang yang telah ditentukan, apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam persidangan pada kedudukannya dan kepastiannya sebagai pihak dalam perkara yang

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 743.

¹⁶ *Ibid.*, 774.

sedang disedangkan Secara formal pernyataan yang dibuat wajib dianggap benar dan Pasal 1936 KUH Perdata melarang pembuktian sumpah palsu. Pasal 177 HIR juga menyatakan bahwa tidak ada bukti lain yang dapat diminta untuk membuktikan apa yang telah diikrarkan dalam sumpah. Itulah mengapa sumpah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna bersifat mengikat dan tegas. Jadi, benar atau salahnya pihak yang bersumpah, hakim dilarang menghakimi sebagai sumpah palsu.

Namun pembuktian sumpah ini di pengadilan merupakan pembuktian sebagai alternatif terakhir apabila tidak ada alat bukti lainnya yang bisa menguatkan tuntutan ataupun pembelaan. Dan pembuktian sumpah ini juga harus berdasarkan instruksi dari hakim atau dari para pihak itu sendiri yang memohon untuk bersumpah. Jadi di pengadilan tidak serta merta menggunakan pembuktian sumpah untuk memutus suatu perkara, sumpah itu tidak boleh dipertanyakan, karena sumpah berhubungan langsung dengan Tuhan. Oleh sebab itu apabila bersumpah yang tidak benar maka ia akan dihukum oleh-Nya.

Di dalam pengadilan pernyataan sumpah juga dilakukan oleh saksi, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi tersebut terlebih dahulu disumpah bahwa ia memang benar-benar mengetahui, mendengar atau mengalami sendiri. Namun yang dimaksud pembuktian sumpah adalah sumpah yang berisi kebenaran tentang apa yang mengambil sumpah tersebut.

Sumpah dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, sumpah adalah suatu ucapan yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Jika yang ingin diyakini bertentangan dengan hati pembicara, maka dia bersedia menerima sanksi dari Allah. Oleh sebab itu, maka sumpah harus dilakukan dengan atas nama Allah dan tidak boleh selain-Nya, karena yang mampu menjatuhkan sanksi atau kutukan hanyalah Allah. Biasanya sumpah ini dilakukan dengan berjabat

tangan, sehingga kemudian sumpah tersebut dinamai *yamiin* (tangan kanan).¹⁷

Dalam syari'at Islam sumpah dikelompokkan menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. Sumpah *laghwu* (permainan), yakni sumpah yang diucapkan dengan niat bukan untuk meyakinkan seseorang, jika dilanggar maka tidak ada dosa dan tidak ada beban bagi yang melanggarnya.
2. Sumpah *mun'qidah* (sumpah teguh), sumpah yang jika dilanggar wajib membayar kafarat.¹⁸

Dalam hukum Islam sumpah tidak hanya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, tetapi juga digunakan dalam kegiatan dan kegiatan lain seperti dalam transaksi. Oleh sebab itu banyak yang sering menggunakan redaksi sumpah namun dengan niat tidak bersumpah (tidak meyakinkan orang lain). Namun Islam melarang kepada umatnya agar tidak selalu menggunakan sumpah, seperti dalam firman Allah:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 224)

Ayat diatas merupakan sebuah larangan banyak bersumpah dengan nama Allah, karena banyak menyebut nama Allah dalam sumpah dapat menghalangi seseorang berbuat kebajikan, bertakwa, dan melakukan islah (perbaikan antar manusia). Hal ini dikarenakan dengan menyebut nama Allah tidak pada tempatnya dapat mengantar seseorang pada suatu kebiasaan, dan kebiasaan tersebut mengantarkan kepada dosa.

¹⁷ M. Qurasy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 483.

¹⁸ Wahyudin, “Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia.”, 46.

Adapun dasar hukum sumpah beserta telaah tafsirnya menurut M. Quraisy Shihab adalah sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (Q.S. Al Baqarah : 225)

Kata *al-lagwhu* secara bahasa mempunyai makna sesuatu yang batal atau dianggap tidak ada. Namun dalam ayat ini diartikan dengan *sumpah yang tidak dimaksud*, artinya sumpah yang diucapkan tanpa ada maksud untuk bersumpah, biasanya sumpah tersebut diucapkan karena spontan, tanpa pikir dan pertimbangan.

Allah tidak menuntut sumpah yang tidak dimaksud, walaupun demikian, sumpah yang dilakukan dengan menyebut nama Allah tanpa berpikir, tanpa pertimbangan dan berkesan meyakinkan orang lain itu merupakan hal yang kurang baik. Seperti pada ayat sebelumnya, telah dijelaskan bahwa janganlah sering-sering bersumpah menyebut nama Allah yang bukan pada tempatnya.

Sumpah yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah sumpah yang dibuat oleh hatimu, yaitu sumpah yang diucapkan atas nama Allah dengan tujuan untuk meyakinkan pihak lain. Jawaban yang diminta oleh-Nya bisa berupa kewajiban untuk memenuhinya, atau jika tidak maka akan dikenai sanksi yaitu membayar kaffarat berupa puasa atau memberi makan orang miskin. Jika tidak maka yang bersangkutan diancam akan dihukum di kemudian hari.¹⁹

Seperti firman Allah dalam Surah Al- Ma'idah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ

¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 485.

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (Q.S. Al Ma’idah : 89)

Jika seseorang mengucapkan sumpah dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain tetapi di dalam hatinya yang dia maksud bukan sumpah, ini yang kemudian disebut sebagai sumpah palsu. Dimana sumpah palsu juga termasuk sumpah yang akan dituntut pertanggungjawabannya kelak di akhirat, apabila ia tidak bertaubat.

Menurut Tengku HM. Hasbi Ashiddieqy sumpah merupakan salah satu jalan untuk menetapkan hukum. Pada dasarnya sumpah ini suatu hal pembuktian yang sangat kuat, karena dengan bersumpah kepada Allah seseorang akan mengingat pada dosa-dosanya nanti. Namun berdasarkan perkembangan zaman, kekuatan pembuktian sumpah semakin lemah, karena pada saat ini sumpah hanya diberlakukan ketika tidak ada bukti lain atau untuk menguatkan pembuktian lainnya.²⁰ Bahkan saat ini banyak orang jika diminta untuk bersumpah maka dengan serta merta ia akan melaksanakan permintaan untuk bersumpah tersebut, tanpa melihat konsekuensi dari sumpah itu sendiri apabila ia berbohong.

²⁰ TM. Hasbi Ashiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang berperkara diperbolehkan menggunakan sumpah sebagai alat bukti dengan syarat untuk menyampaikan kebenaran, jika mengandung kebohongan maka ia sudah melakukan hal yang haram.

Kesimpulan

Sumpah merupakan ucapan atau keterangan dari seseorang untuk meyakinkan orang lain dengan menyebut nama Tuhan. Sumpah tersebut dapat dijadikan alat bukti di dalam pengadilan. Namun alat bukti ini hanya sebagai jalan terakhir apabila alat bukti sebelumnya masih kurang meyakinkan atau tidak ditemukan alat bukti lainnya.

Adapun macam-macam pembuktian sumpah di pengadilan antara lain:

1. Sumpah tambahan / pelengkap
2. Sumpah pemutus
3. Sumpah penaksir
4. Sumpah li'an

Menurut hukum Islam, sumpah adalah suatu ucapan yang disertai dengan menyebut nama Allah, dengan tujuan meyakinkan pihak lain tentang kebenaran ucapan yang bersumpah. Apabila apa yang hendak diyakinkan itu bertentangan dengan isi hati pengucap, maka ia bersedia mendapatkan sanksi dari Allah.

Oleh sebab itu Allah akan menuntut pertanggungjawaban bagi orang yang melaksanak sumpah. Namun pertanggungjawaban yang dituntut adalah apabila sumpah tersebut dilakukan oleh hati, artinya sumpah tersebut dilakukan atas nama Allah dengan sengaja untuk meyakinkan orang lain.

Para fuqaha telah sepakat bahwasanya kekuatan yang tersirat dalam sumpah sebagai alat bukti dan dapat menggugurkan pernyataan yang lain. Oleh sebab itu sumpah dapat dijadikan sebagai pembuktian di pengadilan, baik pengadilan agama ataupun pengadilan umum. Namun alat bukti sumpah ini tidak dapat berdiri sendiri, hakim tidak bisa memberi keputusan perkara karena hanya berdasar sumpah saja tanpa diikuti dengan pembuktian yang lain.

Diperbolehkannya sumpah dijadikan alat bukti di pengadilan didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan Ijma'.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Nur. "Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah." *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 2, no. 2 (2014): 17–34. journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/506/494 Oleh N Ahmad - Artikel terkait.
- Ariandi, Usanti, Wahyudi. "Peran Lembaga Peradilan Dalam Hukum Perdata." *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 1–16.
- Ashiddieqy, TM. Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Shihab, M. Qurasy. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Paradyna Paramita, 2005.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Surgana, Aqsha, and Hernowo Bayu Wicaksono. "Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama." *Gema*, 2015.
- Wahyudin. "Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia," n.d. <https://docplayer.info/73478450-Kekuatan-hukum-sumpah-sebagai-alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia.html>. (diakses pada 4 Februari 2021, pukul 12.18).